

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perusahaan didirikan dengan tujuan meraih laba, namun karena keterbatasan pemilik dalam mengelola, mendorong menyerahkan kendali kepada manajemen. Manajemen bertanggung jawab kepada pemilik dengan memberikan laporan keuangan tentang pengelolaan sumber daya perusahaan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1, Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan aliran kas suatu entitas yang penting bagi para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Salah satu parameter penting dalam laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan sekaligus kinerja manajemen adalah laba yang disajikan dalam laporan laba rugi (Afrizal et al., 2020).

Dalam SFAC (*Statement of Financial Concept*) No.1 menyebutkan bahwa informasi laba berguna untuk mengukur kinerja manajemen, mengestimasi prospek kemampuan laba dalam jangka panjang, memprediksi laba di masa mendatang, dan menaksir risiko terkait dengan investasi dan kredit. Tinggi atau rendahnya laba yang diperoleh entitas akan mempengaruhi minat investor untuk melakukan investasi. Oleh karena itu manajemen terpacu untuk menunjukkan kinerja yang baik dalam menghasilkan nilai laba atau informasi yang maksimal bagi perusahaan dan manajemen akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menampilkan informasi pendapatan perusahaan dengan lebih baik (Andriani et al., 2022). Mengingat informasi laba ini sangat penting dan mayoritas pemakai hanya melihat besaran angka tanpa mengetahui perolehannya dari dan bagaimana, maka celah tersebut dimanfaatkan untuk melakukan tindakan oportunistik oleh manajer.

Masalah keagenan muncul karena adanya konflik kepentingan antara pemilik dan manajer yang tidak menemukan kesamaan utilitas maksimal di antara mereka. Hubungan keagenan merupakan kontrak antara manajer sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal perusahaan. Prinsipal memberikan wewenang kepada

agen untuk menjalankan perusahaan demi kepentingan prinsipal. Sedangkan manajer sebagai agen bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan pemilik. Namun, manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan mereka terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya, karena manajer cenderung melaporkan sesuatu yang memaksimalkan kegunaannya (Gautama & Fatma, 2018). Situasi seperti ini dikenal dengan asimetri informasi yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan praktik manajemen laba. Manajemen laba sendiri dapat didefinisikan sebagai intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba untuk memenuhi tujuan pribadi.

Setiap perusahaan mempunyai tujuan utama untuk memperoleh laba dan pada umumnya setiap perusahaan mempunyai strategi tertentu untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan (Andriani et al., 2022). Namun tidak semua strategi dapat diterima norma atau etika seperti praktik manipulasi laba. Praktik manipulasi laba dalam laporan keuangan, atau yang dikenal sebagai manajemen laba, adalah tindakan yang tidak etis. Hal ini terjadi ketika manajer puncak memanfaatkan fleksibilitas dalam akuntansi untuk mengatur akun demi mencapai tujuan laba yang diharapkan.

Tindakan manajemen laba dapat terjadi baik pada perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta, namun yang sering menjadi sorotan adalah perusahaan BUMN. Faktor tingginya permintaan kualitas pelayanan publik disertai tuntutan meningkatnya pendapatan menjadi penyebab timbulnya perilaku tidak etis. Misalnya terjadi manipulasi laporan keuangan pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada 2017 ada indikasi kecurangan sebesar Rp7,7 triliun. Hal ini disebabkan pada 2017 Jiwasraya tercatat laba sebesar Rp2,4 triliun. Namun, KAP yang mengaudit laporan keuangan 2017 yakni PricewaterhouseCoopers (PwC) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *adverse opinion* dengan modifikasi karena ada kecurangan pencadangan sebesar Rp7,7 triliun. Yang dimana jika pencadangan sesuai ketentuan maka harusnya perusahaan rugi. Selain itu, jiwasraya juga tidak

memperbaharui laporan keuangan mereka alias mengabaikan opini WDP. Selanjutnya disebutkan juga laba keuangan Jiwasraya sejak 2006 semu. Sebab, raupan laba itu diperoleh karena rekayasa laporan keuangan (*window dressing*) (CNN Indonesia, 2020).

Fenomena manajemen laba pada perusahaan BUMN ini juga pernah terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk. Terkait laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018 menunjukkan lonjakan laba bersih yang signifikan, mencapai USD809,85 ribu atau sekitar Rp11,33 miliar, berbeda jauh dari rugi pada tahun sebelumnya sebesar USD216,5 juta. Namun, hal ini memicu kontroversi karena dua komisaris, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria, menyatakan ketidaksesuaian laporan tersebut dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pasalnya, Garuda Indonesia memasukan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai BUMN tersebut. PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan. Kerjasama antara Garuda Indonesia dan PT Mahata Aero Teknologi menimbulkan utang sebesar USD239 juta yang dicatatkan dalam laporan keuangan 2018 sebagai pendapatan. Dari jumlah itu, USD28 juta diantaranya merupakan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan Mahata.

Setelah Kementerian Keuangan menyelesaikan pemeriksaan terhadap auditor laporan keuangan Garuda, KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, ditemukan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Akibatnya, PT Garuda Indonesia dan auditornya, dikenakan sanksi pembekuan izin dan denda. OJK juga memberikan sanksi kepada jajaran Direksi dan Komisaris Garuda Indonesia, dengan denda yang harus dibayar secara patungan sebesar Rp100 juta. Selain itu, masing-masing Direksi juga diharuskan membayar Rp100 juta. Sanksi juga diberikan oleh Bursa Efek Indonesia, termasuk denda sebesar Rp250 juta kepada Garuda Indonesia (Okezone, 2019).

Kasus terbaru ada dari perusahaan BUMN Waskita Karya dan Wijaya Karya, dimana wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa pelaporan keuangan dua BUMN ini tidak sesuai dengan kondisi lapangannya dan sedang dilakukan investigasi (Liputan 6, 2023). Taktik Manipulasi yang dilakukan

adalah dengan mengakali pembukuan dengan cara menyembunyikan setumpuk tagihan dari vendor sejak 2016. Raibnya liabilitas tersebut membuat beban utang mengecil dan kondisi keuangan seolah-olah sehat meski tengah mengalami kesulitan finansial (Tempo, 2023). Pada 2020, WIKA disebut meraup laba bersih Rp 322 miliar, lalu raihan itu turun menjadi Rp214 Miliar tahun 2021, dan kembali turun menjadi Rp 12,5 miliar pada tahun 2022. Sedangkan Waskita mencatatkan penurunan rugi bersih dari Rp 9,28 triliun pada 2020 menjadi 1,67 triliun pada 2022. Kasus-kasus ini sejalan dengan fenomena dalam CNBC Indonesia (2020) yang menyatakan bahwa Erick Thohir selaku Menteri BUMN mengiyakan bahwa banyak perusahaan BUMN yang laporan keuangannya hasil dari manajemen laba berupa *window dressing*. Dengan upaya membuat laporan keuangan perusahaan terlihat lebih baik dari realitas yang ada ini membuat *window dressing* kerap dikonotasikan negatif lantaran ada potensi memanipulasi angka, data, dan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan.

Praktik manajemen laba dapat merugikan berbagai pihak, dengan pengungkapan laba yang cenderung berlebihan sehingga tidak memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Berbanding terbalik, bagi pihak manajemen perusahaan manajemen laba memiliki dampak yang positif karena akan menaikkan harga saham perusahaan. Hal ini disebabkan karena para investor lebih menyukai perusahaan dengan laba yang stabil karena dianggap memiliki risiko yang lebih rendah. Naiknya harga saham akan membuat nilai perusahaan semakin tinggi sehingga berdampak pada kesejahteraan seorang manajer perusahaan. Namun jika aktivitas manajemen laba diketahui publik, maka perusahaan akan kehilangan kepercayaan dari publik yang dapat mengakibatkan jatuhnya nilai perusahaan.

Hingga kini, masih perdebatan antara praktisi dan akademisi mengenai apakah manajemen laba dapat diklasifikasikan sebagai tindakan kecurangan (*fraud*) atau tidak. Banyak praktisi memandang manajemen laba sebagai bentuk kecurangan, sementara akademisi cenderung menyatakan bahwa manajemen laba tidak seharusnya dikategorikan sebagai tindakan kecurangan. Jika kembali pada unsur-unsur fraud (*conversion, concealment, dan theft*), maka kegiatan manajemen laba memenuhi unsur *conversion* (merekayasa, manipulasi) dan *concealment*

(menyembunyikan, menutupi) walaupun tidak secara langsung terjadi *theft* (menguntungkan diri sendiri) (Murpratomo, 2016). Karena dalam praktiknya, laporan keuangan disusun dengan mengikuti kehendak manajemen, tidak mencerminkan kondisi sebenarnya sesuai dengan dukungan standar akuntansi yang berlaku.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya manajemen laba di perusahaan. Faktor-faktor tersebut diantaranya: motivasi bonus (Kalbuana et al., 2019; Rosady & Abidin, 2019), leverage (Ardiyanti Pratika & Nurhayati, 2022; Hanim, 2021), profitabilitas (Ardiyanti Pratika & Nurhayati, 2022; Chandra & Claudia, 2022), motivasi politik (Kalbuana et al., 2019), kepemilikan manajerial dan kepemilikan konstitusional (Lestari, 2012; Tanujaya & Susiana, 2021), *tax avoidance* (Afrizal et al., 2020), ukuran perusahaan (Tanujaya & Susiana, 2021), *CSR Disclosure* (Afrizal et al., 2020; Gautama & Fatma, 2018) dan lain sebagainya.

Ada beberapa faktor yang ditengarai menjadi penyebab upaya rekayasa manajerial dalam menentukan laba ini seolah membudaya dalam pengelolaan sebuah perusahaan, pertama, aturan dan standar akuntansi, transparansi, dan auditing yang memang masih lemah. Kedua, sistem pengawasan dan pengendalian sebuah perusahaan yang belum optimal. Ketiga, *moral hazard* pengelola perusahaan yang memang cenderung mendahulukan dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan pribadi dan kelompoknya (Sulistyanto, 2008). Oleh karena itu, pada penelitian ini akan berfokus pada konservatisme akuntansi sebagai penerapan standar akuntansi yang bisa menekan perilaku oportunistik manajer, kualitas audit sebagai peningkatan standar audit pada perusahaan, dan komite audit sebagai pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dalam menciptakan pelaporan keuangan yang berkualitas.

Adanya kesempatan menyusun laporan keuangan sesuai dengan kehendaknya memunculkan perilaku oportunistik manajer, dimana manajer mengintervensi laporan keuangan dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau pihak-pihak tertentu. Konservatisme akuntansi dapat mengurangi perilaku oportunistik dari manajer yang berupaya memaksimalkan keuntungan pribadinya. Dengan adanya konservatisme, tindakan manajemen untuk mengelola laba dengan

memanfaatkan pengetahuan mereka tentang informasi akuntansi dan ekonomi perusahaan dapat dibatasi (M. L. Sari, 2015). Konservatisme akuntansi adalah prinsip yang mengharuskan pembukuan perusahaan dipersiapkan dengan hati-hati dan verifikasi tingkat tinggi. Akuntansi yang konservatif tidak akan mengakui keuntungan sampai benar-benar terealisasi, sedangkan kerugian akan langsung diakui (Subramayam, 2019:82). Prinsip ini dapat diterapkan untuk mengimbangi optimisme manajemen serta kecenderungan mereka dalam men-*overstate* laporan keuangan.

Praktik manajemen laba salah satunya dikarenakan adanya pilihan metode-metode akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Adanya kelonggaran untuk memilih metode akuntansi sesuai dengan kondisi perusahaan, sehingga mempermudah manajer untuk melakukan manajemen laba. Permainan angka pada informasi laba yang dilaporkan manajemen bisa dipengaruhi oleh perlakuan konservatisme. Sejalan dengan fenomena PT Timah yang merevisi laporan keuangan periode 2018, dengan membukukan laba bersih yang sebelumnya Rp532,35 miliar menjadi Rp132,29 miliar dikarenakan adanya kesalahan pencatatan (Kompas, 2020). Kasus ini menandakan bahwa perusahaan tidak menerapkan konservatisme akuntansi sebelum menyajikan laporan keuangan yang secara tidak langsung mendorong adanya manajemen laba berupa peningkatan laba, hal tersebut dilakukan dalam rangka memanfaatkan fleksibilitas memilih standar yang sesuai keadaan perusahaan untuk diterapkan secara konsisten. Menurut Watts (2003), akuntansi yang konservatif bermanfaat untuk menghindari konflik kepentingan antara investor dan kreditor karena konservatisme akuntansi dapat mencegah pembagian dividen yang berlebihan kepada investor. Penerapan prinsip konservatisme diharapkan dapat meminimalisir resiko yang terjadi karena adanya ketidakpastian dan konflik dalam dunia usaha.

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya terkait kasus PT Garuda tahun 2019, dimana pada laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda yang telah dilakukan audit oleh auditor eksternal terbukti terjadi manipulasi laporan keuangan. Akibatnya PT Garuda Indonesia dan auditornya, dikenakan sanksi pembekuan izin dan denda karena terbukti adanya audit yang tidak sesuai. Kasus ini melatarbelakangi ketertarikan untuk menguji apakah manajemen laba dipengaruhi

oleh kualitas audit. Kualitas audit merupakan kapasitas seorang auditor untuk menganalisis dan mengaudit data keuangan dengan benar dan dapat diandalkan (Sinurat & Sudjiman, 2023).

Kualitas audit adalah salah satu bentuk peranan monitor dalam hubungan agen dan prinsipal dalam teori agensi untuk meminimalisasi konflik kepentingan prinsipal dan agen. Kualitas audit membantu pengurangan asimetri informasi dan memproteksi kepentingan prinsipal khususnya pemegang saham dengan menyediakan suatu jaminan beralasan bahwa laporan keuangan yang disampaikan oleh manajemen adalah bebas dari kesalahan saji material (Susanty, 2022). Audit adalah alat monitor untuk pemegang saham karena auditor akan melaporkan kesalahan saji material yang terdeteksi dalam laporan keuangan yang diaudit.

Pengukuran kualitas audit yang umumnya digunakan adalah *size*, spesialisasi industri auditor, *audit tenure*, dan *fee* audit. Pada penelitian ini kualitas audit diukur menggunakan ukuran KAP dengan penunjukkan KAP *big four* oleh perusahaan. Seperti pada penelitian (Sinurat & Sudjiman, (2023), Indriswati & Triyanto, (2014), dan Kusumaningrum & Achmad, (2022)) kualitas audit diukur dengan indikator penggunaan KAP *big four* untuk mengaudit perusahaan. Menurut Chambers et al. (2011) menunjukkan KAP besar dikaitkan dengan kualitas persistensi akrual semakin rendah karena tingkat independensi yang tinggi. Auditor eksternal yang memiliki reputasi baik diharapkan mampu menemukan dan melaporkan apabila suatu perusahaan mempunyai indikasi adanya penyimpangan seperti manajemen laba. Untuk dapat menunjukkan tingginya kredibilitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan, perusahaan biasanya menggunakan jasa KAP yang berafiliasi dengan *Big Four*. Oleh karena itu perusahaan yang menggunakan jasa audit eksternal dari KAP *big four* diharapkan memiliki kualitas audit yang lebih baik.

Selanjutnya, untuk melemahkan terjadinya praktik manajemen laba oleh manajemen perusahaan, maka dibutuhkan suatu mekanisme tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam hal pengendalian dan pengelolaan perusahaan. *Good Corporate Governance* berfokus pada memotivasi perilaku manajerial yang benar untuk meningkatkan kinerja bisnis dan secara konsisten

mencegah praktik manajemen laba. Penerapan *Good Corporate Governance* didasari oleh teori agensi, yang bertujuan menghindari konflik antara pihak *principal* dan *agent*. Konflik yang muncul akibat perbedaan kepentingan dalam teori agensi perlu dikelola agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Tujuan dari konsep *Good Corporate Governance* adalah menciptakan pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan.

Dalam rangka menerapkan tata kelola yang lebih baik, BUMN telah mendorong peningkatan organisasi yang lebih produktif dan efektif lewat sejumlah transformasi yang dilakukan dalam lima tahun terakhir. Seperti yang dikutip dari Antaranews (2024) BUMN melakukan transformasi besar-besaran di bawah Kepemimpinan Kementerian BUMN. Transformasi ini diantaranya menyelesaikan masalah struktural yang lama membelit BUMN. Seperti masalah di BUMN karya, asuransi, hingga kereta cepat. Tak hanya itu, BUMN juga melakukan transformasi tata kelola perusahaan. Transformasi tegas yang dilakukan Menteri BUMN Erick Tohir dengan menutup BUMN yang mengalami kegagalan sistemik akibat alpa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik di masa lalu. Transformasi yang dilakukan pada berbagai lini baik di Kementerian BUMN maupun pada perusahaan BUMN ini telah menunjukkan hasil menggembirakan. Dalam empat tahun terakhir ini Laba Bersih BUMN terus tumbuh (bumn.id, 2023). Setelah mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, perusahaan BUMN berangsur-angsur bangkit seiring dengan mulai bangkitnya perekonomian Indonesia.

**Gambar 1. 1 Pertumbuhan Laba BUMN**



Sumber: [bumn.go.id](http://bumn.go.id)

Secara umum, *Good Corporate Governance* (GCG) merujuk pada sistem pengendalian dan regulasi perusahaan yang mencakup hubungan antara berbagai pemangku kepentingan yang mengelola perusahaan. Salah satu komponen GCG adalah komite audit, yang berfungsi untuk mengatasi masalah keagenan. Komite audit bertanggung jawab untuk menjaga standar audit yang tinggi dan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Untuk memastikan kepatuhan terhadap standar audit yang berlaku, komite audit dapat mengawasi proses audit, meninjau hasil audit, dan berkoordinasi dengan akuntan publik yang melakukan audit. Dikutip dari *detikFinance.com* (2023) pemerintah sedang berusaha meningkatkan kualitas pelaporan korporasi, termasuk laporan keuangan BUMN. Salah satu langkah yang diambil adalah memperketat pengawasan terhadap proses audit internal perusahaan melalui peran Komite Audit.

Komite audit merupakan pihak independen dalam perusahaan yang berada dibawah naungan dewan komisaris untuk membantu mengevaluasi dan memantau perencanaan serta pelaksanaan internal kontrol perusahaan (Anjarningsih et al., 2022). Sehubungan dengan teori keagenan, komite audit merupakan salah satu mekanisme pengawasan untuk menghindari perilaku oportunistik manajer. Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham, dewan komisaris dan manajemen dalam menangani masalah pengendalian (Muda et al., 2018).

Komite audit harus berkompeten dibidangnya agar bisa mengawasi kompleksnya pelaporan keuangan dan tuntutan kualitas pelaporan keuangan yang semakin menjadi kebutuhan (Anjarningsih et al., 2022). Keberadaan komite audit yang kompeten dalam perusahaan akan mendorong manajer untuk menerapkan prinsip konservatisme akuntansi, guna menghindari tindakan oportunistik jangka pendek. Jika manajemen melaksanakan fungsi pemantauan dengan baik, hal ini akan menghasilkan standar pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi, sehingga penerapan prinsip konservatisme akuntansi pun akan meningkat (Soraya, 2014). Tugas komite audit untuk mengawasi manajemen agar laporan keuangan tersaji secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, diharapkan menghambat terjadinya manajemen laba.

Selanjutnya, praktik GCG juga tidak luput dari dukungan untuk menciptakan kualitas audit yang tinggi. Laporan auditor disampaikan dan diperiksa oleh komite audit perusahaan, yang berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dan auditor. Komite audit harus menyetujui semua layanan audit serta layanan non-audit, dan harus menerima informasi akuntansi dan audit terbaru dari auditor. Oleh karena itu, mekanisme GCG yang efektif oleh komite audit akan menciptakan komunikasi yang jujur, terbuka, dan akuntabilitas tinggi antara manajemen dan auditor terkait keandalan laporan keuangan yang disusun, serta memastikan bahwa proses audit dilakukan dengan independensi yang tinggi. Dengan demikian, keberadaan komite audit yang efektif diharapkan dapat memoderasi pengaruh kualitas audit terhadap praktik manajemen laba.

Penelitian tentang pengaruh konservatisme akuntansi terhadap manajemen laba menunjukkan hasil yang beragam. Hasil penelitian (Afrizal et al., 2020) dan (Hartam & Kresnawati, 2022) menunjukkan konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Semakin tinggi tingkat konservatisme dalam laporan keuangan, semakin terbatas kesempatan bagi manajer untuk memanipulasi informasi dalam laporan keuangan. Ini mengakibatkan kemungkinan tindakan manajemen laba oleh manajer menjadi semakin kecil serta akan mempengaruhi asimetri informasi antara agen dan pemilik saham. Sejalan dengan hasil penelitian (Mardiana et al., 2022) menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi mempunyai hubungan dengan praktik manajemen laba pada perusahaan BUMN Indonesia, dimana rendahnya praktik konservatisme akuntansi akan cenderung meningkatkan praktik manajemen laba terutama dengan metode peningkatan laba. Hasil penelitian (Lin et al., 2014) menunjukkan bahwa perusahaan dengan pelaporan keuangan yang lebih konservatif memiliki kemungkinan lebih kecil untuk terlibat dalam aktivitas manipulatif pendapatan.

Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian (Krismiaji & Astuti, 2019) dan (Chandra & Claudia, 2022) konservatisme akuntansi mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen laba. (Andriani et al., 2022) menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap manajemen laba dengan arah positif, pemilihan metode konservatisme akuntansi dalam laporan keuangan akan membuat manajerial lebih berhati-hati dan memilih kebijakan manajemen laba

dengan pola penurunan laba. (Anjarningsih et al., 2022) bahwa konservatisme akuntansi merupakan faktor yang mampu meningkatkan manajemen laba, semakin perusahaan menerapkan konservatisme akuntansi, maka manajemen laba semakin meningkat. Sedangkan menurut (Gautama & Fatma, 2018) konservatisme tidak berpengaruh pada manajemen laba. Hasil olah data menunjukkan konservatisme memiliki arah pengaruh negatif terhadap manajemen laba, akan tetapi tidak signifikan.

Penelitian terdahulu yang menguji kualitas audit dengan manajemen laba menunjukkan hasil yang beragam. Hasil penelitian Sinurat & Sudjiman (2023) dan Anggara & Kurniadi (2021) kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan hasil penelitian (Natsir & Badera, 2020) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Semakin tingginya kualitas auditor eksternal yang digunakan oleh suatu perusahaan akan dapat menurunkan praktik manajemen laba yang terjadi pada perusahaan. Dimana (Yazar Soyadi, 2020) membuktikan bahwa auditor *big four* dapat melemahkan perilaku manajemen laba secara signifikan. Indriswati & Triyanto (2020) mendapatkan temuan yang sama, dimana variabel eksternal audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada. Artinya bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* dan KAP *non-big four* dapat mempengaruhi adanya tindakan manajemen laba pada perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian Kusumaningrum & Achmad (2022) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba, dimana kualitas audit yang tinggi masih belum mampu membatasi terjadinya praktik manajemen laba. Hal tersebut dapat disebabkan perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* hanya bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangannya. Sedangkan hasil penelitian (Laily, 2017) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Sedangkan untuk *good corporate governance* yang diprosikan oleh komite audit memiliki hasil penelitian terdahulu yang beragam. Salim & HN, (2015) menunjukkan Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Manajemen Laba. Komite Audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) yang dapat mengurangi sifat oportunistik manajemen yang

melakukan manajemen laba dengan memantau laporan keuangan dan mengawasi audit eksternal. Sejalan dengan hasil penelitian (Natsir & Badera, 2020) bahwa komite audit berpengaruh secara negatif terhadap praktik manajemen laba perusahaan. Hal ini berarti dengan semakin tingginya proporsi anggota komite audit yang independen akan dapat menurunkan praktik manajemen laba yang terjadi pada perusahaan. Komite audit memiliki kontrol atas tata kelola entitas, terutama dalam hal manajemen laba. Akibatnya, kehadiran dan operasi komite audit dapat menghentikan pelanggaran perusahaan, khususnya pada praktik manajemen laba (Sinurat & Sudjiman, 2023). Sedangkan hasil penelitian (Mardiana et al., 2022), (Anjarningsih et al., 2022), dan (Priharta et al., 2020) menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

Apabila manajemen menjalankan fungsi monitoring dengan baik, maka akan memberikan standar pelaporan keuangan yang memiliki kualitas tinggi sehingga penggunaan prinsip konservatisme akuntansi akan semakin tinggi (Soraya, 2014). Sejalan dengan hasil penelitian Wulandari & Machmuddah, (2022) komite audit mampu melemahkan tindakan *creative accounting* ketika dipengaruhi konservatisme akuntansi. Ini berarti jumlah anggota komite audit jika ditambah maka tingkat *risiko creative accounting* akan menurun karena kuatnya pengawasan yang dilakukan oleh komite audit. Akan tetapi, hasil penelitian Arifiyati & Machmuddah, (2019) menunjukkan komite audit tidak bisa memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap manajemen laba.

Setiawan & Fitriany, (2011) menemukan komite audit akan mempengaruhi kualitas audit karena komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memantau proses laporan keuangan oleh manajemen. Chi et al., (2011) menemukan penenaan kualitas audit yang tinggi dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak disengaja (*unintended consequences*) kepada manajemen perusahaan dalam menghasilkan manajemen laba *real* pada perusahaan-perusahaan yang menaikkan laba, sehingga diperlukan pengawasan dari dewan atau komite audit perusahaan. Pada penelitian (Susanty, 2022) dimana penerapan GCG yang baik dapat memoderasi pengaruh negatif kualitas audit dengan aktivitas manajemen laba real. Akan tetapi hasil penelitian F. K. Sari et al., (2020) menunjukkan Komite audit tidak mampu memoderasi pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba.

Masih terdapat kesenjangan dan hasil yang belum konsisten sehingga memunculkan *research gap* pada variabel yang digunakan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi dan kualitas audit terhadap manajemen laba yang dimoderasi oleh praktik *good corporate governance*. Pembaruan atau perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terkait populasi perusahaan yang diambil, dan periode tahun penelitian. Perusahaan yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipilih sebagai subjek penelitian karena selalu menjadi sorotan publik. BUMN, yang umumnya dimiliki oleh pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dan menunjukkan kinerja yang baik. Namun, adanya pengaruh politik yang kuat dalam pembuatan kebijakan dapat meningkatkan potensi manajemen laba. Selain itu, banyaknya kasus yang muncul baru-baru ini terkait perusahaan BUMN menjadi alasan penulis memilih untuk meneliti perusahaan BUMN di Indonesia dan ingin menguji kembali apakah faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya masih berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan BUMN tahun 2020-2023)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh konservatisme akuntansi terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN di Indonesia?
3. Apakah *good corporate governance* dapat memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN di Indonesia?

4. Apakah *good corporate governance* dapat memoderasi pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba pada perusahaan BUMN di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi dan kualitas audit terhadap manajemen laba dan bagaimana *Good Corporate Governance* yang diprosikan oleh komite audit memoderasi pengaruh tersebut pada perusahaan BUMN Indonesia tahun 2020-2023.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat dalam segi teoritis dan segi praktis. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan, sumber pemahaman serta sebagai referensi atau literatur pertimbangan terkait pengaruh konservatisme akuntansi dan kualitas audit terhadap manajemen laba serta bagaimana GCG memoderasi pengaruh tersebut. Untuk peneliti sendiri penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan atas apa yang sedang diteliti.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, manfaat, serta panduan bagi para investor sebelum membuat keputusan dalam berinvestasi di perusahaan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini juga dapat membantu investor dalam menilai kualitas laba perusahaan melalui analisis mendalam tentang kondisi perusahaan, sehingga investor dapat menghindari praktik manajemen laba yang mungkin merugikan investasinya.